

PELAKSANAAN PEMBINAAN BIROKRASI LOKAL DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGITAHUN 2014

Oleh :

Rosy Aprianida

Rosyaprianida92@gmail.com

Pembimbing Drs. H. Isril, MH

**Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293**

ABSTRACT

The title of this research is Implementation Guidance Bureaucracy Local In District Cerenti Regency Kuantan Singingi Based on the discovery of the phenomenon that occurred in the field that there are still employees who work not in accordance with the rules that exist as employees who are not honest and careful, Officer Head Cerenti not put the interests state or governance in order to run properly. They are more concerned with their own interests, not excited employees in the District Cerenti work so there's always a delay to the maintenance done by society, and lack of supervision Head coaching in regulating discipline employees, because the home office working hours also still many employees who violate the rules.

The problem of this research is How Implementation Guidance Local Bureaucracy in District Kuantan District Cerenti Singingi 2014.

The type used in this research is descriptive qualitative survey techniques. The location of this research is done in Kuantan District District Office Cerenti Singingi. Informants are Singingi Kuantan District Secretary, Head of BKD, Head Cerenti, Secretary Cerenti the District, the District Officer Cerenti.

The results of the study Implementation Guidance Bureaucracy Locally in Sub Cerenti Regency Kuantan Singingi has not done well and perfect for the run, there are several processes that coaching is done running properly is Giving guidance, Directing, provide education and training, provide instructions, and Giving guide there are some indicators that are not carried out by the district head to direct the local bureaucracy is based on research results of the indicators mentioned in the provision of guidance, mentoring and itruksi-instructions. Yet undone properly because there is still an employee nga melakkan infringement of several of these indicators.

Keywords: Implementation, Development, Local Bureaucracy,

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kecamatan merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang Camat selaku Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati. Selaku Kepala Wilayah, Camat mempunyai tugas secara umum memimpin dan membina penyelenggaraan roda pemerintahan di kehidupan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada pasal 31 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 15 menyatakan bahwa;

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek;

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan

Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pembinaan sebagaimana di maksud Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 47, pembinaan pegawai negeri sipil menyangkut sebagai berikut:

Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan sebagai salah satu

bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 ayat 7, 9, dan pada ayat 11 yang menjelaskan bahwa:

Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

Adapun sebagai landasan dari teori pembinaan yang dimasukkan dalam penelitian ini menjadi pedoman dalam hal pembinaan yaitu PP 30 Tahun 1980 tentang pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil disebutkan pada pasal 2 yaitu "Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini tentu kita lihat pembinaan yang dilakukan oleh Camat atau Sekretaris Camat dalam melakukan hal pembinaan disiplin pegawai apakah kurang melakukan pembinaan atau sudah melakukan pembinaan, adapun upaya yang dilakukan oleh Camat atau Sekcam yaitu dengan pemberian hukuman atau sanksi yang dilakukan apa bila pegawai yang kurang disiplin namun hal ini berjalan hanya sebentar saja

karena melihat jauhnya tempat tinggal pegawai dan kantor, sehingga Camat atau Sekcam memberi keringanan ± 15 menit dari waktu yang ditentukan.

Untuk melaksanakan itu pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat beserta pegawainya dituntut untuk mempunyai kualitas yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan pemerintah yang benar-benar berfungsai sebagai pelayanan masyarakat/*publik servis* dan bukan sekedar menjadi alat pemerintah.

Disiplin bertujuan untuk menjamin ketaatan dalam mematuhi peraturan, menjamin suatu kondisi agar pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya secara benar dan bertanggung jawab, memastikan agar sarana dan prasarana perusahaan dipergunakan dan dipelihara dengan baik, merespon partisipasi pegawai, serta pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi sesuai dengan harapan suatu organisasi.

Berangkat dari gejala-gejala di atas rendahnya pelayanan umum kepada masyarakat yang diakibatkan oleh pegawai Kantor Kecamatan yang tidak disiplin sehingga banyak pekerjaan mereka yang terbelangkalai, yang seharusnya urusan-urusan bisa selesai lebih cepat sekarang masyarakat sampai berulang kali datang ke Kantor Kecamatan Untuk melakukan Pengurusan. indikasi ini kurangnya pembinaan dari Camat, hal ini terlihat dari perilaku pegawai/bawahan:

1. Masih ada pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti pegawai yang tidak jujur dan cermat dalam tugas yang diembannya sehingga banyak tugas yang dilakukannya tidak selesai dengan semestinya ataupun tidak berjalan sesuai apa yang telah direncanakan.
2. Pegawai Camat Cerenti tidak mengutamakan kepentingan Negara ataupun pemerintahan agar berjalan dengan baik. Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri, karena pada saat jam kerja masih banyak terlihat pegawai yang berada di kantin atau di luar kantor. Sehingga masyarakat begitu lama menunggu untuk pengurusan di Kecamatan Cerenti tersebut.
3. Tidak bersemangatnya karyawan Kecamatan Cerenti dalam bekerja sehingga selalu terjadi penundaan terhadap pengurusan yang dilakukan masyarakat, menyebabkan masyarakat datang berkali-kali ke kantor Camat Cerenti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk melengkapi dalam memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Riau-Pekanbaru.
- b. Bahan informasi bagi pihak kantor Kecamatan Cerenti atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan pembinaan.
- c. Bahan informasi bagi mereka yang ingin meneliti dan mempelajari masalah pembinaan.

D. Konsep Teori

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:6) mengatakan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003:6) mengatakan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Syafiie (2007: 3) menjelaskan bahwa kebebasan berangkat dari faktor manusia yang ingin eksis dalam hidupnya, sedangkan peraturan berangkat dari faktor keterbatasan manusia sebagai makluk yang diciptakan. Pada perkembangannya dari keinginan manusia akan kebebasan dan keterbatasan diri terhadap sesuatu serta keinginan untuk eksis dalam hidupnya, maka peraturan mutlak harus diadakan. Dari pereaturan ini akan lahir pihak yang mengatur (memerintah), dan inilah awal dari pembentukan pemerintahan.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007: 32), ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-

problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau

- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau

Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehinggadiperoleh metode-metode bekerja setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara

Sedermayanti (2004: 9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan menyelenggarakan

pemerintah, setidaknya ada 7 tugas pokok

Menurut Syafi'i (2005:20) mengemukakan pemerintah berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan pihak memerintah memiliki wewenang, pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Sementara Ndraha (2005:36) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Azam mengatakan (2012: 6) bahwa pemerintah adalah segenap alat kelengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Apapun yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut sebagai representasi Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya.

2. Pengertian Birokrasi Lokal

Birokrasi lokal adalah lengan pemerintah daerah yang belum dikembangkan. Kepegawaian lokal

adalah birokrasi yang sedang dalam proses pembentukan. Meskipun birokrasi ini terutama dibentuk untuk mencapai salah satu tujuan utama pemerintah daerah, yakni pemberian pelayanan secara efektif, namun belum mendapatkan perhatian semestinya (Muttalib, 2010:231).

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis *bureau* yang berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani *kratein* yang berarti mengatur (M. Mas'ud Said, 2007:1). Menurut Max Weber seperti yang dikutip M. Mas'ud Said (2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

Menurut Rourke seperti yang dikutip M. Mas'ud Said (2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Menurut Piffner dan Presthus seperti yang dikutip M. Mas'ud Said (2007:4) mendefinisikan birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Berdasarkan konsepsi legitimasi, Weber seperti yang dikutip oleh M. Mas'ud Said (2007:5) merumuskan

proposisi tentang penyusunan system otoritas legal yakni:

- a. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan;
- b. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai dengan fungsinya yang masing-masing dilengkapi dengan syarat tertentu;
- c. Jabatan tersusun secara hierarki yang disertai dengan rincian hak-hak control dan pengaduan;
- d. Aturan disesuaikan dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal;
- e. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi;
- f. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya;
- g. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan menjadikan kantor sebagai pusat organisasi modern;
- h. Sistem otoritas legal memiliki berbagai bentuk, tetapi dilihat pada aslinya sistem tersebut tetap berada dalam suatu *staf administrasi birokratik*.

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi menurut Max Weber sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi

ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut (Lijan Poltak Sinambela dkk, 2006:53).

Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang (Wahyudi Kumorotomo, 2009:74).

Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari suatu organisasi birokrasi menurut Syukur Abdullah seperti yang dikutip (Wahyudi Kumorotomo, 2009:79) menguraikannya dalam tiga kategori birokrasi sebagai berikut :

- a. Birokrasi pemerintahan umum yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah (propinsi), kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa. Tugas-tugas tersebut bersifat mengatur.
- b. Birokrasi pembangunan yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri, Fungsi pokoknya adalah

development function atau adaptive function.

- c. Birokrasi pelayanan yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain : rumah sakit, sekolah, koperasi, bank rakyat desa, transmigrasi, dan berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama pemerintah, fungsi utamanya adalah *service*.

Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Agus Dwiyanto, 2006:50-51) yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*.

2. Kualitas layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi

mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat *responsivitas* disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang *eksplisit* maupun implisit.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Menurut Sofian Efendi dalam (Miftah Thoha, 2007:18), untuk

menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan responsive dalam rangka mendukung tata pemerintahan yang demokratis serta ekonomi nasional, pemerintah seharusnya menerapkan strategi kelembagaan reformasi birokrasi yang bertujuan:

1. Memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja;
3. Membangun kapasitas aparatur negara untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal;
4. Organisasi dan sumber daya manusia aparatur yang *professional, apolitical, netral, transparan, dan akuntabel*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian birokrasi adalah sistem administratif dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya. Dalam bidang publik konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikendalikan.

3. Teori Pembinaan

Pembinaan menurut Mifta Thoha (2003 : 182) adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni Pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan, dan yang Kedua, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu.

Faisal Salam (2003 : 45) menyatakan bahwa Pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang mempunyai sifat taat setia, patuh dan bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi dan radar akan tanggung jawab sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan juga sebagai aparatur negara.

The Liang Gie (1991: 17) Pembinaan yang baik diperlukan adanya usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan, dan pengendalian atau pengawasan.

Selanjutnya menurut Nawawi (1995 : 60) Pembinaan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Situmorang (1994 : 176) Pembinaan Pegawai dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang

bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas, oleh karena itu pelaksanaannya harus terus berkesinambungan.

Tjahya Supriatna (1996 : 98) menjelaskan tentang sarana pembinaan yang bisa digunakan, yakni :

- a. Berbagai produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri. Dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku itu dijadikan dasar dan arah kemana pembinaan dilakukan.
- b. Melakukan berbagai forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja, dan pengawasan.
- c. Melalui pelaksanaan program baik berupa program bantuan, proyek maupun bantuan teknis.
- d. Melalui forum pendidikan, kursus, dan latihan atau tukar pelaksanaan.
- e. Melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan
- f. Melalui alih tugas atau mutasi personil dan dengan membentuk tim pembinaan dan lain-lain.

Santoso (1995 : 219) mengatakan bahwa Pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan, yaitu :

1. Adanya bimbingan dari atasan
2. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan

3. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karier, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan pelatihan kerja

4. Memberikan penghargaan

Menurut Santoso (1995: 52)

Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar pembinaan dapat berjalan baik maka dilakukan beberapa cara :

- a. Pemberian bimbingan
- b. Memberikan pengarahan
- c. Memberikan pendidikan dan pelatihan
- d. Memberikan instruksi-instruksi
- e. Memberikan buku petunjuk

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pada tertib administrasi. Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi meliputi pada penyelenggaraan bimbingan teknis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik survey deskriptif. Menurut Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun penelitian

ini dilakukan dari tanggal 20 Oktober 2015 sampai selesai.

3. Sumber Data

Yang menjadi key Informan adalah Camat di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan yang menjadi informan bersinggung langsung tentang Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel. 5.
Data Informan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Sekda Kabupaten Kuantan Singingi	1
2	Kabag BKD	1
3	Camat Cerenti	1
4	Sekretaris Kecamatan Cerenti	1
5	Pegawai Kecamatan Cerenti	4
Jumlah		8

4. Jenis Data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Pelaksanaan

Pembinaan Birokrasi Lokal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014.

- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengamatan (*Observasi*)
Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau

menggambarkan tentang Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014.

b. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014. Dalam kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian dilapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemberian bimbingan harus sering dilakukan karena dengan itu para pegawai atau karyawan bisa mentaati aturan yang ada dan semoga tidak akan ada lagi pelanggaran yang terjadi, oleh sebab itu pemberian bimbingan yang terjadi berdasarkan wawancara diatas kurang dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan

- birokrasi tidak terlaksanakan dengan baik.
2. Memberikan bimbingan akan terjadi atau dilakukan oleh Camat Kecamatan Cerenti apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan terlalu sering dilakukan oleh Karyawan atau pegawainya, akan tetapi pemberian pengarahan ini apabila dilakukan setiap karyawan atau pegawai melakukan Di Kecamatan Cerenti pemberian pengarahan belum begitu terlaksananya dengan baik.
 3. Pembinaan birokrasi lokal dari Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, yang berarti mereka telah seharusnya untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan bertanggung jawab akan pelanggaran aturan kecamatan yang dilanggar dan yang seharusnya mereka lebih peduli dengan tugas mereka dan disiplin akan aturan yang ada.
 4. Pihak kecamatan tidak terlalu sering memberikan pendarahan kepada para pegawainya karena para pegawai yang ada di Kecamatan Cerenti kebanyakan sudah tahu dan menerti dengan apa yang seharusnya dilakukannya dan kewajiban mereka itu apa, kemudian tugas yang harus dilakukannya itu seperti apa, mereka sudah mengerti dan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Akan tetapi masih

banyak juga yang yang harusnya diberikan arahan oleh pihak olah camat agar mereka mengerti dan memahami tugas yang harus mereka kerjakan.

5. Memberikan buku petunjuk sesuai dengan kedudukan mereka di Kecamatan Cerenti walaupun masih ada dari mereka yang tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dalam menjalankan tugasnya karena masih perlu bimbingan, yang disebabkan kurangnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang manambah pengetahuan dan pemahaman dari pekerjaannya dan mengetahui tugas yang harus dilakukan mereka.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kecamatan Cerenti agar mengadakan pelatihan-pelatihan dalam pembinaan birokrasi lokal
2. Kepada camat harus melakukan pengawasan terhadap pegawai sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam aturan yang telah ada.
3. Kepada pegawai agar selalu mengikuti setiap pelatihan yang diadakan oleh Kecamatan untuk menambah kemampuan mereka dalam menjalankan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Brotodihardjo, R,Santoso,1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- H. Hadari Nawawi. 1995. *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Jakarta. Gajah Mada Universitas Press.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Mas'ud Said. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press.
- Martono dan Agus Harjito, 2001, *Manajemen Keuangan, Edisi Keempat*, Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miftah Thoha. 2007. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moch. Faisal Salam, SH, MH., 2003. *Perseroan Terbatas di Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press. Yogyakarta.
- Situmorang. 1994. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori Kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Admistrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Supriatna. Tjahya. 1996. *Administrasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- The Liang Gie, 1991, *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahyudi Kumorotomo. 2009. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang
Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomr 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan